

MEMBEDAH KONSEP DAN TEORI PARTISIPASI SERTA IMPLIKASI OPERASIONALNYA DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN

Tatang M. Amirin

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

Abstrak

Konsep (istilah) partisipasi kerap diberi makna sebagai peran serta aktif seseorang dalam keseluruhan tahapan (proses) pembangunan atau program apapun, mencakup tahap pembuatan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemeliharaan, dan pemantauan serta evaluasi program. Pemberian makna seperti itu sering kali menjebak peneliti mengenai partisipasi masyarakat, sehingga, karena tidak selalu mungkin masyarakat berpartisipasi secara menyeluruh (disebut sebagai partisipasi profesional), maka lalu tingkat partisipasi masyarakat menjadi terukur dalam kategori rendah.

Sering pula konsep partisipasi yang diindonesiakan sebagai peran serta itu diartikan secara sempit sebagai berandil (peran disamamakan dengan andil); tegasnya memberikan sumbangan, apakah dalam bentuk buah pikiran, tenaga, dana, bahan-bahan dan sejenisnya.

Kedua pemaknaan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Oleh karena itu perlulah konsep partisipasi itu dikaji-bahas lebih dalam untuk mendapatkan rumusan pengertian yang lebih tepat. Dalam hal ini rumusan yang dibuat UNICEF (1986) yang membedakan partisipasi menjadi dua rumpun besar berjenjang, yaitu keterlibatan (involvement) dan keberperansertaan (participation) tepat untuk dijadikan batasan pengertian.

Lebih jauh dari itu, yang tidak pernah diperhitungkan atau diukur dalam penelitian adalah bahwa keberperansertaan (partisipasi) ataupun keterlibatan anggota masyarakat dalam sesuatu program atau kegiatan (misalnya program sekolah), sebenarnya bisa secara langsung dan tidak langsung. Selain itu, bisa secara disengaja (disadari), bisa pula tidak.

Kata kunci : *Keterlibatan (involvement) dan keberperansertaan (participation); partisipasi aktif-pasif, langsung-tak langsung, disadari tak disadari.*

Pendahuluan

Ketika orang membicarakan partisipasi (dalam sesuatu program atau kegiatan) maka akan sering kali terumuskan sebagai harus mencakup partisipasi dalam perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan pemantauan serta evaluasi. Dalam konteks inilah maka ada sebutan *partisipasi aktif* yang dilawankan dengan *partisipasi pasif*.

Sebagai contoh, Totok Mardikanto (1994:328), misalnya, menyatakan sebagai berikut.

Berbicara mengenai partisipasi, menurut hemat saya, sudah barang tentu tidak cukup berdasarkan pernyataan "formal." Tetapi lebih dari itu adalah peran serta yang aktif secara "faktual" artinya, berperan aktif secara nyata dan bukannya hanya sekedar setuju atau "diam" terhadap apa yang sedang dan telah berlangsung di sekelilingnya, setuju ataupun tidak. Di samping itu, meninjau atau menilai makna partisipasi masyarakat tentu tidak hanya sepotong-sepotong dalam arti, partisipasi yang diberikan harus benar-benar berlangsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan bahkan pemeliharaan demi kelanggengan kegiatan-kegiatan yang akan, sedang, dan telah diselesaikan.

Sehubungan dengan pengertian itu, jika pengertian adanya partisipasi masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan hanya dinilai dari selama proses *pelaksanaannya* saja kiranya tidak dapat dan saya percaya tidak mungkin disangkal. Namun, jika yang kita maksudkan adalah, bagaimana partisipasi masyarakat di dalam proses *perencanaan, pengawasan, dan pemeliharannya* memang masih perlu dipertanyakan.

Apa yang ditulis Mardikanto didahuluinya dengan "pengantar" berupa pernyataan beberapa pakar pembangunan (masyarakat desa) mengenai "partisipasi aktif" masyarakat, yang dinukilnya antara lain sebagai berikut (kata-kata tertentu dicetak tebal penulis).

... Sayogyo (1982) dari IPB misalnya, menguatkan pendapat Hasan dengan menyatakan bahwa, *partisipasi* yang dilakukan masyarakat desa (kalaupun ada) hanyalah sekedar terpaksa, ikut-ikutan. Arbi Sanit (1982) dari UI, menilai bahwa dalam pembangunan yang sedang

berjalan, rakyat lebih berperan sebagai tenaga kerja, dan belum sebagai pihak yang menentukan arah pembangunan.

Manakala partisipasi harus selalu dimaknai serupa itu, maka konsekuensinya apabila seseorang “evaluator” (peneliti) akan mencoba mengukur tingkat partisipasi masyarakat¹, yang menjadi tolok ukurnya adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (mencakup lebih kurang: perencanaan program, pelaksanaan program, pemeliharaan hasil program, pemanfaatan hasil program, dan monitoring serta evaluasi program) disertai ragam wujud partisipasi (ide, tenaga, materi, uang dsb). Contohnya : Nafiri F.Paramasiwi, (2004), *Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Petani dalam Pengembangan Wisata Agro Salak Pondoh*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Konsekuensi lebih lanjut, manakala terdata, misalnya, partisipasi masyarakat itu hanya dalam “pelaksanaan program” saja, itupun mungkin, seperti disebut-sebut Arbi Sanit dan Sayogyo di atas, hanya sebagai “pekerja pelaksana” yang “ikut-ikutan” saja, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut akan dikategorikan sebagai *sangat rendah*.

Permasalahannya dengan demikian adalah: Apakah ada yang salah dengan pemaknaan konsep (istilah) partisipasi (dan teori partisipasi secara keseluruhan) serupa itu? Jawabannya: Ya, dan tidak. Untuk itu perlu kiranya dibedah-dikaji bagaimana seharusnya istilah (konsep) dan teori partisipasi itu diberi makna, sehingga manakala seseorang akan melakukan penelitian mengenai partisipasi, operasionalisasinya akan menjadi jauh lebih sah (valid).

Partisipasi Akif dan Pasif

Istilah partisipasi diambil dari bahasa Inggris *participation*. Dalam penggunaannya sehari-hari di Indonesia istilah “participation” tersebut ada kalanya diserap begitu saja menjadi partisipasi, ada kalanya diterjemahkan menjadi: ikut serta (keikutsertaan), peran serta (berperan serta), ambil bagian, dan terlibat (keterlibatan). Contoh penggunaan “gabungan” dari istilah-istilah

tersebut sebagai berikut (Ndraha, 1990:102; kata-kata tertentu sengaja dicetak tebal untuk menonjolkan maksud menukil contoh).

Partisipasi yang dimaksud dalam tulisan ini ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat **terlibat** atau **mengambil bagian** dalam suatu program pihak lain (Dawam Raharjo, 1983:78), dalam hubungan mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien.

Contoh lain yang juga menggabungkan beberapa terjemahan dari *participation* itu tampak dalam definisi partisipasi Mardikanto (1994:317; menukil Theodorson, 1969; juga kata-kata tertentu dengan sengaja dicetak tebal dan atau miring).

Dalam pengertian sehari-hari, *partisipasi* merupakan **keikutsertaan** atau **keterlibatan** seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan di sini bukanlah bersifat pasif, tetapi **secara aktif** ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai **keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian** dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Dalam nukilan di atas ada bagian kalimat yang secara sengaja penulis cetak tebal, yaitu yang bunyi lengkapnya “**partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian** dari kegiatan masyarakatnya.” Dalam definisi tersebut (entah sengaja atau tidak disengaja dibuat demikian oleh perumusny) terkesan ada nuansa berbeda antara **ikut serta** dan **ambil bagian**. Jelasnya, keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau program, baru akan disebut sebagai partisipasi manakala orang tersebut **ambil bagian** dalam kegiatan atau program tersebut. Jika keikutsertaan dalam kegiatan atau program tersebut tidak disertai dengan ambil bagian, hanya sekedar ikut-ikutan saja (keikutsertaannya bersifat pasif), tidak disebut sebagai partisipasi. **Ambil**

Jadi, sebutan aktif dalam partisipasi aktif bukan berarti giat, rajin, dan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kegiatan atau program, melainkan ikut terlibat atau mengambil peran pula sebagai “penentu” (ikut menentukan, memutuskan, merencanakan) program atau kegiatan yang akan dilakukannya bersama-sama orang lain tersebut, bukan hanya sebagai pelaksana semata.

Dalam konteks inilah maka dalam dunia pendidikan ada sebutan **peserta didik** untuk menyebut murid (siswa), mahasiswa, atau siapapun yang melakukan kegiatan belajar formal (dan nonformal). Dengan sebutan peserta didik dikandung makna bahwa murid, mahasiswa, atau kursisten itu, hendaknya tidak diperlakukan sebagai “objek pasif” dalam kegiatan didik-mendidik (proses belajar-mengajar), melainkan diperlakukan sebagai “subjek-aktif” yang ikut serta menentukan kegiatan didik-mendidik.

Seperti telah dikemukakan di muka, yang disebut partisipasi aktif itu sering diberi makna sebagai “keterlibatan” secara lengkap (menyeluruh) dalam aspek-aspek atau proses berikut (Yadav, 1980—dalam konteks pembangunan; dikutip Mardikanto, 1994:317-318).

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program dan proyek-proyek pembangunan;
4. Partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan.

Bagian terpenting dari keterlibatan dalam program, proyek, atau kegiatan yang disebut berpartisipasi aktif itu adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam makna inilah pernyataan Sayogyo, yang memperkuat pendapat Hasan Purbo, dan juga pernyataan Arbi Sanit, seperti telah dinukil di muka, berada.

Seperti telah disebutkan, Sayogyo menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat desa (kalaupun ada) hanyalah **sekedar terpaksa atau ikut-ikutan**. Arbi Sanit lebih menegaskan lagi bahwa dalam pembangunan yang sedang berjalan, rakyat lebih berperan sebagai tenaga kerja, dan belum sebagai **pihak yang menentukan arah pembangunan**.

Bagian pernyataan Sanit yang dicetak tebal itulah yang menunjuk kepada partisipasi dalam "pengambilan keputusan." Sebaliknya, pernyataan Sayogyo yang dicetak tebal dalam tulisan ini menunjuk kepada partisipasi pasif, bahkan lebih dari sekedar pasif, karena "terpaksa," sehingga jatuh dalam kategori semata-mata sebagai "objek pembangunan," sama sekali tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan, lebih-lebih sebagai "pemrakarsa" pembangunan.

Partisipasi Sebagian dan Menyeluruh

Manakala partisipasi aktif diberi makna seperti disebutkan di muka, maka partisipasi mau tidak mau akan mengandung arti keterlibatan menyeluruh (total) dalam seluruh tahapan "program kegiatan." Yang dimaksud tahapan program kegiatan adalah seperti yang disebutkan Yadav di muka. Ndraha (1990:103-104), walau tidak dalam konteks partisipasi aktif itu harus menyeluruh, bahkan lebih merinci tahapan partisipasi (dalam konteks pembangunan) itu menjadi sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*).
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana).

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

“Tahapan program” seperti tersirat dari pendapat Yadav dan Ndraha di atas lazimnya disederhanakan menjadi sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan program;
2. Tahap pelaksanaan (pengerjaan) program;
3. Tahap monitoring dan atau evaluasi program;
4. Tahap pemanfaatan, pemeliharaan, dan atau pengembangan (hasil atau produk) program.

Menurut pemikiran logis dan kenyataan kehidupan keseharian, partisipasi (dalam makna keterlibatan) masyarakat dalam program (pembangunan dan sebagainya) itu dapat secara **menyeluruh**, mencakup keseluruhan tahapan program, bisa pula hanya dalam **bagian atau tahapan** tertentu. Ndraha menyebut partisipasi secara menyeluruh itu sebagai **partisipasi prosesional**, yaitu mencakup **seluruh proses** pembangunan (dari “penerimaan informasi” sampai dengan pemantauan atau evaluasi), sedangkan partisipasi dalam sebagian saja dari keseluruhan proses atau tahapan itu disebutnya sebagai **partisipasi parsial**.

Sejalan dengan yang dikemukakan Ndraha, maka partisipasi masyarakat (anggota masyarakat) dapat terjadi hanya dalam satu bagian saja dari keseluruhan proses pembangunan atau program. Dalam realita, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan (program) tampaknya yang paling banyak dilakukan masyarakat.

6. Berperan-serta sebagai pelaksana tugas;
7. [Yang paling lengkap] Berperan-serta benar-benar dalam “pembuatan keputusan” dalam setiap tahapan program atau kegiatan, mencakup mendata-menyidik (mengidentifikasi) masalah, meneliti kelayakan (kemungkinan-kemungkinan), merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi.

Menurut penjelasan Shaeffer, empat pengertian (tingkatan) partisipasi yang pertama, yang menggunakan istilah keterlibatan (*involvement*) menunjukkan apa yang biasa disebut sebagai *partisipasi pasif* (dalam bahasa Shaeffer diistilahkan *passive collaboration* atau kerjasama pasif), sementara tiga tingkatan terakhir yang menggunakan istilah keberperansertaan (*participation*) menyiratkan adanya peran yang lebih aktif (partisipasi aktif).

Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pemberian contoh partisipasi “di sekolah” seperti yang dicontohkan UNICEF (atau Shaeffer) tersebut di atas. Sekolah merupakan produk (hasil) pembangunan. Tugas atau fungsi sekolah adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Itu sebabnya dalam contoh disebut “partisipasi dalam memanfaatkan layanan sekolah.” Layanan sekolah kepada masyarakat itu berupa memberikan pendidikan. Jadai, jika seseorang anak masuk menjadi murid sekolah (atau orang tua memasukkan anaknya menjadi murid sekolah), maka berarti yang bersangkutan (anak atau orang tua anak) sedang memanfaatkan layanan sekolah (layanan pendidikan yang disediakan sekolah).

Sekolah juga mempunyai berbagai fasilitas. Mungkin sekolah punya asrama (sekolah berasrama atau sekarang populer dengan menggunakan istilah Inggris agar “mentereneng” sebagai *boarding school*). Sekolah juga mungkin punya aula, lapangan sepak bola, lapangan bola basket, lapangan bola voli, dan perpustakaan. Semua fasilitas itu bisa dimanfaatkan masyarakat langsung atau tidak langsung (melalui anaknya yang masuk sekolah tersebut). Yang demikian ini disebut juga sebagai partisipasi.

Jika diperbandingkan, atau dipadukan, dengan tahapan-tahapan program (perencanaan, pengerjaan, penilaian, dan pemanfaatan beserta pemeliharaan dan pengembangan hasil program), apa yang dirumuskan UNICEF itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. **Keterlibatan dalam pemanfaatan hasil pembangunan.** Dalam hal ini contohnya sekolah (yang sudah ada, sudah dibangun). "Partisipasi" dalam pemanfaatan hasil (produk) pembangunan (berupa sekolah) itu disebutkan antara lain berupa menjadi siswa (jika orang tua, berarti memasukkan anaknya ke sekolah tersebut), dan atau memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Dalam konteks inilah maka dalam perencanaan atau manajemen pendidikan ada istilah *tingkat partisipasi*, yang mengandung makna banyak sedikitnya anggota masyarakat (usia sekolah) masuk sekolah (bersekolah).
2. **Keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengembangan hasil program.** Dalam hal ini dicontohkan dengan memberikan sumbangan atau bantuan, berupa sumber-sumber (sarana pendidikan), bahan-bahan (material), dan tenaga. Dalam konteks ini, di lain pihak ada yang terlibat memanfaatkan—mungkin bahkan menghabiskan—sumber-sumber, bahan material dan tenaga ini, tidak terlibat menyumbang. Jelasnya, ada pihak yang menyumbang, dan tentu saja, di pihak lain, ada yang memanfaatkan sumbangan itu. Misalnya, beberapa orang wali murid menyumbangkan buku-buku untuk perpustakaan sekolah. Buku tersebut dimanfaatkan oleh seluruh murid, termasuk yang orang tuanya tidak menyumbang. Jadi orang tua murid yang lain (melalui anaknya) "terlibat memanfaatkan" bahan-material berupa buku tersebut.
3. **Keterlibatan—pasif—dalam "perencanaan program" (bisa pula dalam "monitoring dan evaluasi program" dan hal-hal lain).** Dalam hal ini dicontohkan dengan ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan wali

murid di sekolah, tetapi kehadirannya benar-benar sekedar hadir. Jelasnya ikut mendengarkan apapun yang dibicarakan dalam forum, apakah berupa perencanaan program pemeliharaan dan pengembangan sekolah, ataupun dalam “monitoring dan evaluasi” pelaksanaan program sekolah. Dalam hal ini yang bersangkutan benar-benar sama sekali “tidak angkat bicara,” hanya sekedar hadir menyaksikan (dan menyetujui keputusan).

4. **Keterlibatan-pasif-aktif-dalam program.** Dalam hal ini dicerminkan dengan contoh melakukan dialog (konsultatif) dalam berbagai hal yang menyangkut sekolah. Disebut semi-aktif karena orang yang terlibat (partisipan) tersebut sudah mulai “buka suara,” walaupun tidak melakukan penyampaian ide atau gagasan yang memunculkan pembuatan keputusan, lebih banyak “meminta penjelasan-penjelasan.” Dengan kata lain, tidak sekedar hadir di sekolah, melainkan sudah mulai “bicara” di sekolah. Tetapi pembicaraan yang dilakukannya lebih banyak “meminta,” bukan “memberi” masukan, saran, nasehat, anjuran dan sejenisnya.
5. **Partisipasi (aktif ikut ambil bagian) dalam pelaksanaan program.** Dalam hal ini dicontohkan dengan ikut serta menjadi pelaksana (membantu melaksanakan) kegiatan sekolah. Kegiatan itu sendiri bukan menjadi tugas-kewenangannya. *Keikutsertaannya* sekedar membantu pelaksana yang sesungguhnya. Dalam kategori ini dapat dimasukkan orang tua yang membantu anaknya mengerjakan PR (partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan), atau orang tua yang ikut “membantu” menyiapkan tenda (kemah) dan fasilitas lainnya di tempat kemping saat sekolah mengadakan kemping Pramuka.
6. **Partisipasi (mengambil peran aktif) dalam pelaksanaan program.** Dalam hal ini dicontohkan dengan menjadi **pelaksana tugas**. Tegasnya, benar-benar menjadi pelaku program. Tugas-kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari wewenang dan tanggung jawab (pelaksanaan

program atau kegiatan) yang diberikan kepadanya. Guru yang mengajar, sebagai contoh, dapat dikategorikan sebagai partisipan dalam program (penyelenggaraan) sekolah. Orang tua murid yang menjadi pengurus komite sekolah juga termasuk yang berpartisipasi aktif sebagai pelaksana program atau kegiatan.

7. **Partisipasi (berperan serta) secara menyeluruh (profesional) dalam program.** Dalam hal ini seseorang ikut terlibat sepenuhnya dan mengambil peran sebagai peserta penuh dalam keseluruhan proses program, sejak perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan program. Orang tua murid yang menjadi pengurus komite sekolah sangat mungkin berperan serta aktif “profesional” dalam penyelenggaraan sekolah seperti dimaksudkan. Jelasnya, ikut serta membuat keputusan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta memanfaatkan hasil-hasil program.

Dalam tulisan ini istilah keterlibatan mencakup (dan dibedakan dari) **keikutsertaan**. Seperti akan diuraikan di bawah, terlibat dan ikut serta dapat mengandung makna yang berbeda. Orang dapat *terlibat* secara langsung atau tidak langsung. Ikut serta mengandung makna terlibat secara langsung dalam program atau kegiatan. Sebagai contoh penjelas, Si Jahhat membunuh Si Nenekaya dengan diantar oleh Si Jahhil. Pelaku pembunuhan itu Si Jahhat. Si Jahhil tidak ikut serta (ambil peran) membunuh, tapi ia dianggap terlibat dalam pembunuhan, karena mengantarkan Si Jahhat.

Ragam partisipasi versi UNICEF di muka mengandung pula apa yang dalam berbagai literatur tentang partisipasi disebut sebagai **bentuk partisipasi**. Bentuk partisipasi—dalam berbagai literatur—umumnya dimaksudkan **wujud** sesuatu (benda, uang, atau tenaga) yang “disumbangkan” ke dalam lembaga tempat partisipasi dilakukan.

Dalam pada itu, harus juga diingat kembali rumusan dan pembatasan pengertian partisipasi seperti yang telah dirumuskan UNICEF. Ada banyak “bentuk” atau “wujud” partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat (terhadap pendidikan). Pemberian “sumbangan fisik” (sumber-sumber atau sarana dan prasarana serta uang, bahan, dan tenaga) merupakan salah satu bentuk saja (bentuk kedua) dari tujuh bentuk partisipasi atau keterlibatan rumusan UNICEF).

Dengan kata lain, jika ingin mengukur tingkat partisipasi haruslah diadakan **pembobotan penilaian terhadap berbagai bentuk partisipasi dan keadaan kemampuan pelaku partisipasi**. Baru adil (valid dan reliabel).

Partisipasi Langsung - Tidak Langsung, Sengaja - Tak Disengaja

Sejauh ini yang dibicarakan selalu partisipasi atau keterlibatan yang langsung (keikutsertaan) dalam program atau kegiatan, apakah dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil, atau dalam penilaian program. Dengan kata lain, yang benar-benar terlibat langsung dalam program tersebut. Tidak pernah terbicarakan bahwa ada bentuk partisipasi lain yang tidak langsung dalam program tersebut.

Selain itu, orang mungkin benar-benar sadar (sehingga sengaja) melakukan kegiatan untuk turut berpartisipasi. Tetapi, ada pula orang yang sebenarnya sedang berpartisipasi, tetapi yang bersangkutan sendiri tidak sepenuhnya menyadari bahwa ia sedang berpartisipasi.

Ketika sekolah Muhammadiyah (dalam contoh di muka) melaksanakan program rehab bangunan, maka program (kegiatan) yang tampak adalah **melakukan** rehab bangunan. Oleh karenanya, partisipasi akan dilihat dari sudut ikut serta dalam kegiatan merehab bangunan tersebut ataukah tidak, bisa dalam bentuk tenaga, uang, bahan bangunan, atau konsumsi kerja bakti dan sejenisnya. Jelasnya, jika diteliti maka yang akan (lazim) ditanyakan adalah apakah yang bersangkutan ikut serta merehab dengan memberikan sumbangan pikiran, tenaga, bahan material, uang, atau lainnya.

tertentu dari tahapan pembangunan. Selain itu, setiap tahapan sebenarnya dapat mengandung aspek perencanaan dan pembuatan keputusan, sehingga dalam kasus seperti ini, apa yang dikatakan Lyons bisa diberlakukan.

Sebagai contoh, “generasi baru” anggota masyarakat sudah “tinggal menerima” (dan memanfaatkan) keberadaan sebuah sekolah di tempatnya berada sebagai peninggalan generasi terdahulunya. Contoh lain, masyarakat tinggal menerima keberadaan wisata agro yang sudah dibangun Pemerintah (mungkin beserta pemuka-pemuka masyarakat terdahulu). Jadi, yang ada “tinggal” tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan (hasil) program pembangunan tersebut. Apakah masyarakat tidak bisa berpartisipasi aktif? Tentu mungkin dan bisa, karena, seperti telah disebutkan, dalam setiap tahapan pun ada kegiatan perencanaan (pengambilan keputusan).

Dengan kenyataan serupa itu, maka derajat tinggi rendah partisipasi masyarakat seyogyanya tidak diukur dari keterlibatan aktif-menyeluruh atau terlibat pasif, melainkan dari sudut **kesempatan dan kemampuan** anggota masyarakat itu sendiri berbanding **tuntutan-keperluan keberhasilan program**. Dalam hal ini program itu sendiri tentu yang sifatnya realistik, bukan utopia, yang membumi, bukan yang menggantung asap, mengukir langit. Selain itu, bisa hanya dalam sisi pelaksanaan, atau dalam pemanfaatan, dan mungkin pula dalam pemeliharaan.

Sebagai contoh, seseorang menyumbang pembangunan mesjid sebesar satu juta rupiah, sementara orang lainnya hanya bersedekah lima puluh ribu rupiah. Secara kasat mata tampak orang pertama jauh lebih tinggi partisipasinya (sumbangannya) dalam pembangunan mesjid tersebut dibanding orang kedua. Tetapi manakala dilihat dari penghasilan bulanan kedua orang tersebut, mungkin penilaian akan lain. Orang pertama penghasilannya per bulan tidak kurang dari lima juta rupiah, sementara orang kedua hanya lima ratus ribu rupiah. Yang pertama masih bisa “hidup mewah” dengan gajinya (untuk ukuran tahun

Daftar Pustaka

- Forojalla, S.B. 1993. *Educational planning for development*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Little, A., Hoppers, W., and Gardner, R. Ed. (1994). *Beyond Jomtien implementing primary education for all*. London: The Macmillan Press Co.
- Mardikanto, Totok. (1994). *Bunga rampai pembangunan pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

Daftar Telaahan

- Ediwibowo, S. 2005. *Partisipasi orang tua siswa dalam penyelenggaraan kepramukaan di sekolah dasar se-Kecamatan Banguntapan KabuaptenBbantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hanik, M. L.. 2003. *Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an se-Desa Drono Ngawen Klaten*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Haryanti. 2003. *Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS di MTsN dan MAN se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 dan 2003*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Istiqomah. 2005. *Partisipasi masyarakat non-wali murid dalam penyelenggaraan sekolah dasar negeri di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Paramasiwi, N.F. (2004). *Hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam pengembangan wisata agro salak pondoh (Studi kasus di Wisata Agro Salak Pondoh Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.